

No. 163 Agustus - September 2019

BaKTI**News** www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**TIDAK SEKADAR
PENDAMPING**

**MENGUBAH MINYAK JELANTAH
MENE MENJADI BIODIESEL DI MAKASSAR**

**SAIK DAN PERBAIKAN TATA KELOLA
KAMPUNG BIS AGATS**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU
FADHILAH MANSYUR
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Praktik Cerdas & Info Buku **SUMARNI ARIANTO**
Database & Sirkulasi **INDINA ISBACH**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Editor Foto

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

Menjadi Pelanggan BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Berkontribusi untuk BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

Daftar Isi

BaKTI**News**

Agustus- September 2019

No. **163**

- 1** Tidak Sekadar Pendamping
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 5** Mengubah Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel di Makassar
Oleh **EKO RUSDIANTO**
- 10** Pemindahan Ibu Kota Siap Libatkan Masyarakat Lokal hingga Bangkitkan Sulawesi
- 13** Menelaah Sejarah Otonomi Daerah (Bagian 2- Selesai)
Oleh **HENDRI F. ISNAENI**
- 17** SAIK dan Perbaikan Tata kelola Kampung Bis Agats
Oleh **PETRUS SUPARDI**
- 21** Perkawinan Anak dan Pencapaian SDGs (Bagian 2- Selesai)
Oleh **LUSIA PALULUNGAN**
- 25** Jembatan Keledai dari Paniai
Oleh **LUNA VIDYA MATULESSY**
- 29** Membekali Guru PAUD di Pulau Saparua
Oleh **TIRZA WENDRY KAILOLA**
- 33** LANDASAN II Dorong Pengarusutamaan Admindak dan GESI
Oleh **FADHILAH MANSYUR**
- 37** Kolintang: Dari Musik Ritual Hingga Panggung Festival (Bagian 2 - Selesai)
Oleh **RIKSON KARUNDENG**
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku
- Foto Cover : **Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI**

Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua
Foto: **Dok. KOMPAK-LANDASAN**





Tidak Sekadar Pendamping

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Ibu Yustina di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan Ibu Nini Kusniaty di Kota Ambon, Maluku adalah dua ibu yang terpanggil menjadi pendamping perempuan korban kekerasan. Panggilan ini lahir karena keprihatinan dan kepedulian yang besar kepada para perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ibu Yustina sebelumnya pernah menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Suami yang dikasihinya menikahi perempuan lain. Walaupun berat, Ibu Yustina tidak berlarut-larut meratapi kondisinya. Ia bangkit menjadi seorang perempuan yang tidak hanya mengurus diri dan anak-anaknya, tetapi bersedia mendampingi orang-orang yang membutuhkan bantuannya.



Foto: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

Dalam kalangan masyarakat di Negeri Batu Merah dan Kota Ambon, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap sebagai urusan pribadi rumah tangga atau masalah domestik. Sehingga mendampingi korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Ibu Yustina kemudian menjadi seorang kader Posyandu aktif yang mengurus Balita hingga suatu waktu ia diajak bergabung ke dalam sebuah Kelompok Konstituen. Tidak tanggung-tanggung, tidak lama setelah bergabung, ibu Yustina menjadi Koordinator Kelompok Konstituen yang diberi nama Kelompok Konstituen Lestari. Beliau

kemudian mulai sibuk mengurus berbagai kegiatan, termasuk pendampingan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pada masa awal berdiri, Kelompok Konstituen Lestari memang menerima berbagai pengaduan. Hanya saja tidak semua pengurus mempunyai kapasitas untuk mengurus dan mendampingi kasus. Hadirnya ibu Yustina, membuat kelompok ini dipercaya untuk mendampingi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Sebagai seorang penyintas, ibu Yustina memiliki empati yang lebih dalam membantu korban-korban kekerasan untuk bangkit. Seringkali ia membagi pelajaran hidup yang dari pengalaman pahitnya.

Sayangnya, pendampingan oleh Ibu Yustina melalui Kelompok Konstituen Lestari tidak selalu mendapatkan respon positif. Ada saja anggota masyarakat yang menganggap Ibu Yustina dan Kelompok Konstituen ini sebagai orang-orang yang

kurang kerjaan dan mengurus urusan pribadi orang lain. Namun, Ibu Yustina dan temannya di Kelompok Konstituen Lestari tidak selalu memedulikan omongan dan cibiran dari orang-orang tersebut. Karena ternyata, mereka yang sebelumnya mencibir itu pun akhirnya membutuhkan bantuan Kelompok Konstituen saat menghadapi masalah.

Sebagai pendamping, Ibu Yustina bekerja secara sukarela.

Kerelaan dalam mengemban panggilan menjadi pendamping ini juga perlu dikelola bahkan dilembagakan. Seorang pendamping perlu memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah penanganan korban kekerasan, bahkan penting bagi seorang pendamping seperti Ibu Yustina untuk mengetahui prosedur pelaporan kasus kekerasan kepada pihak berwajib.

Di Ambon, Maluku, Ibu Nini Kusniaty juga menjadi pendamping korban kekerasan. Ibu Nini Kusniaty adalah seorang aparatur sipil negara yang bertugas di Kantor Bea Cukai Kota Ambon. Ketika Kelompok Konstituen Walang Hatukau terbentuk di Negeri Batu Merah, Ibu Nini bergabung sebagai Ketua Seksi Data dan Informasi.

Sebelum bergabung dengan Kelompok Konstituen Walang Hatukau, Ibu Nini pernah menjadi Ketua RT 004/RW 01 Negeri Batu Merah. Saat menjadi Ketua RT, Ibu Nini terbiasa mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan warganya, seperti membantu warga mengurus kartu penduduk, akta kelahiran, dan lain-lain.

Ada hal yang berbeda dialami Ibu Nini saat masih menjadi Ketua RT. Dahulu, Ibu Nini lebih pasif dalam melaksanakan tugas. Ia baru membantu warganya jika warga tersebut meminta bantuan. Walaupun demikian, sebagai seorang perempuan yang menduduki posisi Ketua RT, warga, terutama perempuan,



lebih mudah menyampaikan pendapat dan keluhan kepada Ibu Nini. Ibu Nini kerap membantu warga menyelesaikan beragam masalah, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta anak putus sekolah adalah hal-hal yang paling sering ditanganinya kepada Ibu Nini.

Saat masih menjadi Ketua RT, Ibu Nini seringkali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain karena ia bergerak seorang diri dalam menyelesaikan kasus, ia pun belum mendapat dukungan yang dibutuhkan dari aparat pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu Ibu Nini juga belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan saat itu ia belum

1 Yustina **2,3** Aktivitas pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat di Parepare

4 Nini Kusniaty **5,6** Aktivitas pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat di Ambon

Sumber foto : MAMPU-Yayasan BaKTI

memiliki jaringan pendukung dari lembaga lain yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak.

Dalam kalangan masyarakat di Negeri Batu Merah dan Kota Ambon, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap sebagai urusan pribadi rumah tangga atau masalah domestik. Sehingga mendampingi korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Ini menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi Ibu Nini.



Setelah bergabung dengan Kelompok Konstituen Walang Hatukau, Negeri Batu Merah, Ibu Nini berulang kali menyampaikan kepada masyarakat agar mengadukan masalah kepada kelompok. Ibu Nini juga aktif meningkatkan pengetahuannya tentang langkah-langkah penanganan kasus kekerasan dan memperluas jaringan pendukung.

Meningkatkan Pengetahuan

Melalui Kelompok Konstituen, Ibu Yustini dan Ibu Nini mendapat pelatihan mengenai Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, pengorganisasian, advokasi, dan pelatihan paralegal.

Paralegal adalah tenaga yang memiliki kemampuan teknis, baik dalam menangani dan mendampingi korban, maupun jaringan dan advokasi. Ini menjadi salah satu kemampuan

dasar yang dimiliki oleh pengurus Kelompok Konstituen yang mengelola Layanan Berbasis Komunitas atau *Shelter* Warga. Pelatihan paralegal bertujuan meningkatkan kapasitas pendamping, khususnya terkait proses hukum, mulai dari pemeriksaan kepolisian hingga proses pengadilan.

Selain memiliki pengetahuan tentang prosedur penanganan kasus, pendamping korban kekerasan perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang kondisi psikologis korban kekerasan. Seorang korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, seringkali berada pada posisi yang disalahkan bahkan dijadikan bahan lelucon oleh aparat. Situasi seperti ini dapat terjadi selain karena pemahaman aparat yang minim tentang perspektif korban, korban juga didampingi oleh pendamping yang tidak profesional.

Wawasan tentang kondisi psikologis korban menjadi penting dimiliki oleh pendamping agar dapat memberi dukungan moral yang dibutuhkan dan tidak menjadi pihak yang justru menyalahkan apalagi menyudutkan korban.

Setelah mengikuti berbagai pelatihan dan rajin-rajin membekali diri dengan pengetahuan baru, Ibu Yustini dan Ibu Nini kini tidak lagi berjuang seorang diri. Para pendamping ini telah mengetahui bagaimana cara dan kapan waktu yang tepat mengakses layanan-layanan yang disediakan pemerintah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan baru yang dimiliki oleh pendamping korban kekerasan, layanan yang dikelola komunitas kini mampu mendeteksi dini berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat, sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak awal. Perhatian dan dukungan masyarakat secara luas dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus melindungi dan menyelamatkan korban lebih cepat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU dapat menghubungi info@bakti.or.id

Minyak jelantah menjadi persoalan yang kompleks, telah diketahui sejak lama namun tak memiliki jalan keluar. Di Kota Makassar setidaknya sebanyak 17 ton minyak bekas pakai atau minyak jelantah dapat dihasilkan setiap hari dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pabrik makanan. Ini tentu persoalan lingkungan yang sangat serius.

Di tangan pihak yang tak bertanggung jawab, minyak jelantah ini kemudian berubah wujud menjadi minyak goreng curah berwarna lebih jernih setelah dicampurkan dengan H₂O₂ (hidrogen peroksida) dan dipanaskan. "H₂O₂ itu adalah racun. Kami biasa menggunakannya untuk bahan bakar roket cair. Minyak bekas pun sudah beracun. Jadi racun bercampur racun. Inilah yang banyak dikonsumsi masyarakat," kata Andi Hilmy Mutawakkil yang kerap disapa Hilmy.

Hilmy adalah seorang anak muda, mahasiswa antropologi di Universitas Negeri Makassar. Ia melakukan beragam penelitian ilmiah sejak SMA dan saat itu bercita-cita membuat sumber energi terbarukan.

Bersama Andi Haswawi, kawan karibnya di Kabupaten Pangkep, mereka melakukan berbagai percobaan untuk menguji berbagai metode mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel. Setamat SMA, kelompok peneliti ini menyelesaikan riset dan memulai usaha energi terbarukan di Makassar.

Setelah mendapatkan suntikan modal sebanyak 3,5 juta rupiah, mereka mulai memproduksi biodiesel. Bahan bakunya diperoleh dari penjual gorengan pinggir jalan. Sebanyak 30 liter minyak jelantah diolah menghasilkan 30 liter biodiesel juga.

MENGUBAH MINYAK JELANTAH MENJADI BIODIESEL DI MAKASSAR

Oleh **EKO RUSDIANTO**
Foto **YUSUF AHMAD**



Berbekal modal dari kocek masing-masing dan setumpuk ketekatan, Hilmy, Fauzi, Aswawi, dan memulai usaha yang mereka sebut super keren karena bergerak dibidang energi.

Beragam tantangan dihadapi demi usaha super keren ini. Untuk membangun sebuah perusahaan biodiesel, dibutuhkan pabrik skala besar, modal yang besar dan perputaran uang yang bergerak cepat. Kumpulan anak muda yang merasa keren ini tak kenal lelah mendekati beragam institusi untuk mendapatkan



modal yang dibutuhkan. Tentu saja, ini bukanlah hal yang mudah.

Berkali-kali Hilmy dan kawan-kawan melakukan presentasi mengenai rencana perusahaan. Banyak yang tertarik dengan konsep besar mereka. Tapi dua syarat utama, minimal usia 21 tahun dan berstatus sudah menikah, membuat nama mereka yang masih berusia 19 tahun saat itu tercoreng dari list penerima dana dukungan dari beragam institusi perbankan.

Hilmy dan kawan-kawan percaya, ada seribu jalan ke Roma. Hubungan antar perkawanan adalah salah satunya. Enam orang kemudian bergabung di awal 2015. Pada bulan Maret di

tahun itu, perusahaan atas nama Garuda Energi Nusantara (GEN Oil) akhirnya berdiri setelah berhasil menghimpun 500 juta rupiah dari kawan-kawan yang memberi dana 100 juta rupiah, tanah, motor, mobil, laptop, termasuk menggadaikan barang berharga.

Mengandalkan Preman

Kapasitas produksi pabrik GEN Oil saat baru berdiri dapat mencapai 2 ton per hari, namun kenyataan produksinya 500 liter per hari. Karena pasokan bahan baku yang tersedia tidak sebanyak kapasitas pabrik menghasilkan biodiesel.



Walaupun minyak jelantah banyak dihasilkan dari rumah tangga, restoran dan hotel, dan industri makanan lainnya, ternyata tidak mudah mendapatkannya untuk dipasok sebagai bahan produksi ke pabrik.

Agustus 2015, di saat yang sama dengan riset kebutuhan BBM di Kota Makassar, GEN Oil memasuki wilayah Paotere tiga kali dalam sepekan. Mereka bertemu banyak anak muda sebaya yang tak memiliki kegiatan. Salah satunya adalah Adi.

Adi adalah anak muda yang bermukim di wilayah Daya. Dia menjadikan Paotere sebagai tempat berkegiatan, tempat mengaktualisasi diri. Ia dan 25 kawannya merupakan anak muda bebas dengan akses pendidikan yang minim. Preman adalah label yang dilekatkan oleh masyarakat kepada Adi dan kawan-kawan.

Menjadi preman berarti juga menyangkut stigma malas dan menjadi sampah masyarakat. Tapi GEN Oil memiliki pandangan yang berbeda. Di mata GEN Oil, tak ada seorang pun yang benar-benar badung, setiap orang dewasa menginginkan pekerjaan dan kepercayaan.

Adi dan teman-teman kemudian menjadi bagian penting dari tim lapangan GEN Oil. Mereka memasok minyak jelantah.

Saat itu, GEN Oil akhirnya kerjasama dengan Dompot Duafa untuk memberikan modal kerja. Setiap orang akan mendapatkan keuntungan seribu hingga dua ribu rupiah per liter dari minyak jelantah yang dipasok ke pabrik GEN Oil. Tim Adi menghasilkan hingga 3 juta rupiah setiap bulan dari hasil kerja pengumpulan minyak jelantah.

Berkawan dengan Nelayan

Untuk memastikan kebutuhan pasar akan biodiesel yang dihasilkan, GEN Oil melakukan riset kebutuhan bahan bakar minyak lokasi lainnya di Kota Makassar. Hasilnya ditemukan tingginya permintaan nelayan atas Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Di Kawasan Pelabuhan Tradisional Paotere, Makassar, setiap harinya Pertamina memasok 16 Kilo liter BBM bersubsidi, sementara kebutuhan nelayan saat itu sebanyak 30-40 kilo liter. Saat itu harga bahan bakar solar non-subsidi bisa mencapai harga 10 ribu rupiah per liter. Untuk nelayan kapasitas mesin 2 GT, kebutuhan bahan bakarnya adalah sebesar 100-200 liter per hari.

Tingginya harga bahan bakar minyak dan sulitnya mendapatkan bahan bakar bersubsidi, mengurungkan nelayan untuk pergi melaut. Tidak sedikit nelayan yang beralih menjadi buruh bangunan dan pekerja kasar lainnya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Saat GEN Oil menawarkan biodiesel seharga 5 ribu rupiah per liter. Tak ada seorang nelayan pun yang percaya.

Nelayan tak memandang penting status bahan bakar ber-Standar Nasional Indonesia (SNI). Apalagi bahan bakar ramah lingkungan. Bagi nelayan, bahan bakar berubah warna saja akan menjadi persoalan bagi mesin kapal. Selama ini solar subsidi yang dari pemerintah kuning agak kebiru-biruan. Sementara produk GEN Oil kuning murni.

Mereka pun kemudian menggunakan pendekatan berbeda guna meyakinkan nelayan: berkawan akrab dengan nelayan. Perlahan, GEN Oil memberikan informasi kepada nelayan.

Biodiesel selain ramah lingkungan, juga menjadi bahan bakar yang hemat biaya. Perbandingannya jika menggunakan solar penuh, untuk 1 liter hanya mampu menjangkau jarak 800 meter. Bagi nelayan anggota GEN Oil, jika menggunakan biodiesel penuh 1 liter bahkan mampu mencapai jarak lebih dari 1 kilometer.

Untuk mendapatkan kepercayaan nelayan, mereka meminta para nelayan mencoba saja dulu menggunakan biodiesel GEN Oil, kalau mesin

-
- 1 Minyak jelantah menjadi persoalan yang kompleks sejak dulu, selain tak bisa dikonsumsi karena beracun jika dibuang akan mencemari tanah dan air, GEN Oil mengubahnya menjadi biodiesel.
 - 2 Mantan preman yang sering beroperasi di daerah Pelabuhan Tradisional Paotere menjadi bagian penting dari tim lapangan GEN Oil, mereka menjadi pengumpul dan memasok minyak jelantah.
 - 3&4 Untuk mendapatkan kepercayaan nelayan, GEN Oil meyakinkan para nelayan bahwa biodiesel adalah bahan bakar yang hemat biaya. Kini GEN Oil memasok 1.000-2.000 liter biodiesel per hari ke sekitar 33 kelompok nelayan di Pelabuhan Paotere
 - 5&6 GEN Oil bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan BMKG Sulawesi Selatan mengumpulkan minyak jelantah dari rumah masing-masing. Minyak jelantah yang terkumpul ditukarkan dengan minyak goreng kemasan yang baru
 - 7 Siswa pun ikut mengumpulkan minyak jelantah dari rumah ke sekolah. Uang hasil penjualan minyak jelantah dimanfaatkan sekolah untuk membiayai beragam kegiatan ekstrakurikuler
 - 7 Minyak biodiesel siap didistribusikan untuk kebutuhan nelayan.



kapal rusak akan diganti. Ajaib, nelayan menyambut baik.

“Jika masalah bahan bakar bagi nelayan ini bisa ditangani dengan baik, saya kira di masa mendatang, profesi nelayan Indonesia tidak akan menjadi langka,” kata Hilmy. Kini setiap hari GEN Oil membawa pasokan biodiesel ke nelayan Paotere, melayani sekitar 33 kelompok nelayan. Jumlahnya antara 1.000-2.000 liter per hari.

Dukungan yang Meluas

Saat ini GEN Oil sudah mampu menghasilkan 1.300 liter per hari biodiesel. Nilai aset perusahaan telah mencapai 1,3 miliar rupiah dan omsetnya sudah mencapai 300 juta rupiah per bulan.

Inovasi GEN Oil tidak berhenti sampai di situ. Dengan kesadaran baru untuk membangun energi baru terbarukan berbasis masyarakat, Gen Oil memperluas jangkauan kepada anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA serta gerakan ibu PKK dan Dharma Wanita. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari Bripda Muhammad Ihsan Hakim, seorang Bhabinkamtibmas dari Polsek Wajo, Makassar.

Di Sekolah Dasar Sangir, Jalan Sangir Makassar, GEN Oil memberi penyadaran akan bahaya dari mengonsumsi makanan yang digoreng dengan menggunakan minyak jelantah. Mereka menghimbau para siswa untuk mengingatkan orang tuanya agar tidak lagi menggunakan minyak goreng bekas dan tidak membuang sisa minyak goreng ke selokan.

Berbekal modal dari kocek masing-masing dan ketekatan, Achmad Fauzy Ashari, Ahmad Sahwawi, Andi Hilmy Muttawakil, Fauzy Ihza, Rian Hakim, dan Jonathan Akbar, memulai bisnis di sektor energi baru terbarukan dengan mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel lewat GEN Oil, perusahaan yang mereka bangun.

Siswa diminta mengumpulkan minyak jelantah dari rumah ke sekolah. Minyak jelantah ditampung ke dalam jerigen sekolah dan dibeli oleh GEN Oil dengan harga 2.500 rupiah per kilogram. Uang hasil penjualan dapat dimanfaatkan sekolah untuk membiayai beragam kegiatan ekstrakurikuler.

Metode yang sama juga diterapkan GEN Oil kepada ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan BMKG Sulawesi Selatan. “Teman-teman GEN Oil datang sebagai pembawa solusi. Selama ini, ada banyak ibu-ibu yang tak tahu bagaimana memanfaatkan sisa minyak goreng,” kata Roro Yuliana Radjab, anggota Dharma Wanita Persatuan BMKG Sulawesi Selatan.

Bagi Hilmy, inovasi demi inovasi akan terus dilakukan dengan semangat untuk tetap menjadi bagian dari upaya menyelamatkan lingkungan, menjaga kesehatan, dan memanfaatkan energi baru terbarukan. Potensinya ada di depan mata dan dapat dikerjakan bersama.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Praktik Cerdas BaKTI dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Pemindahan Ibukota Siap Libatkan Masyarakat Lokal hingga Bangkitkan Sulawesi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Bambang Broedjonegoro menegaskan pemindahan Ibukota akan melibatkan masyarakat di lokasi baru. Dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara yang diselenggarakan di Bappenas, 16 Mei 2019, Bambang menyebut ibukota baru diperkirakan akan mendapatkan pertambahan sekitar 1,5 juta penduduk dalam sekitar sepuluh tahun. Ini akan menjadi pasar tersendiri di wilayah yang terpilih.

Warga baru berasal dari aparaturnegara eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI/Polri beserta keluarganya yang berjumlah sekitar 1,2 juta. Sisanya sebanyak 300 ribu merupakan pelaku ekonomi. “Di sinilah kesempatan ekonomi lokal masuk, bisa dari masyarakat sekitar,” kata Bambang.

Bambang mengatakan pemerintah sudah mengkaji dan menyiapkan antisipasi percampuran atau persinggungan antarwarga pendatang dan warga setempat yang akan terjadi pada saat pemindahan ibukota baru.

“Namun, waktu tinjauan ke lapangan penduduk lokal sangat antusias. Ada harapan-harapan daerah mereka akan jadi ibukota,” lanjut Bambang. Tinjauan lapangan yang dimaksud Bambang adalah tinjauan lokasi bersama Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Pernyataan Bambang menjawab kekhawatiran Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro Selrits Wongkaren. Turro mengingatkan agar Indonesia belajar dari Jakarta yang pada akhirnya membuat masyarakat Betawi terpinggirkan dan tak lagi menjadi tuan rumah di DKI Jakarta. “Orang lokal harus dilibatkan dari awal,” kata Turro.

Dari awal maksudnya, sejak ibukota baru dirancang. Sebagai contoh, terkait ketimpangan pendidikan yang berisiko terjadi antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal.

“Pemerintah harus memikirkan sejak semula, kira-kira yang dibutuhkan apa sih, di masa depan yang bisa melibatkan penduduk setempat,” tambahnya.

Pelibatan sejak awal, kata Turro, juga bisa dilakukan dengan mempekerjakan mereka sejak pembangunan kota secara fisik.

“Kemudian ketika sudah mulai berfungsi, mereka sudah dipersiapkan untuk masuk sebagai administrasi dan lain-lain,” tambah Turro.

Pelibatan masyarakat lokal juga akan mengurangi risiko konflik akibat perbedaan etnis dan agama. Terutama jika kelak yang terpilih adalah Kalimantan Tengah yang didominasi Suku Dayak dan beragama mayoritas Kristen. Jika pilihan jatuh ke Kalimantan Timur kata Turro, risiko konflik horizontal lebih sedikit karena di provinsi ini masyarakatnya lebih heterogen.

Membangkitkan Potensi Ekonomi Kalimantan dan Sulawesi

Sementara itu Pakar Perkotaan Yayat Supriyatna menilai pemindahan ibu kota bisa membuat bangkitan ekonomi baru, terutama di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Potensi pengembangan akan terjadi di Pantai Timur Kalimantan, jika pilihan lokasi ibukota jatuh di Kalimantan.

Ia menjelaskan, Banjarmasin akan dijadikan salah satu kota Metropolitan di luar Jawa karena bisa menjadi hub distribusi di Kalimantan dan terhubung dengan banyak wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu Samarinda dan sekitarnya. Proses ini akan menimbulkan perkembangan kota-kota baru di wilayah yang dilalui jalur distribusi antara Banjarmasin hingga Samarinda.

Selama ini menurut Yayat, Kaltim sudah cukup berkembang dengan hadirnya industri manufaktur, perdagangan, dan pertambangan di Bontang serta Balikpapan.

Lalu, bagaimana dengan kebangkitan ekonomi Sulawesi yang sempat disebut Yayat?

“Yang juga menarik yang perlu dikaji jika mulai membangun, Kalimantan tidak punya sirtu (pasir batu). Jadi, kalau mau membangun kota besar (di Kalimantan) harus mengambil dari Palu, Donggala, dari Sulawesi,” tambah Yayat.

Ini kata Yayat yang akan menimbulkan interaksi antar wilayah yang akan membangkitkan ekonomi.



“Ketika kita pindah, kita butuh logistik, butuh sayur mayur, dari mana itu? Potensi terbesar akan didapat dari Sulawesi Selatan, dari Enrekang, ada Toraja, ini mendorong tumbuhnya agrobisnis baru, jarak lebih dekat,” papar Yayat.

Dengan demikian kalau selama ini hub ekonomi terkonsentrasi di Sumatera, Jawa, dan Bali, berikutnya akan ada Kalimantan dan Sulawesi.

Yayat menyimpulkan untuk membangun kota baru di Kalimantan yang kelak mungkin akan menjadi ibukota, jangan hanya terfokus pada pembangunan fisik.

“Tapi pengembangan wilayah pedesaan diperkuat,” lanjut Yayat.

Menteri PPN /Kepala Bappenas, juga menggarisbawahi bahwa rencana perpindahan ibukota baru tak semata-mata pindah lokasi administrasi namun juga untuk mencapai tujuan pemerataan. Selama ini menurut Bambang, ekonomi terkonsentrasi Kawasan Barat Indonesia (KBI) ketimbang Kawasan Timur Indonesia (KTI).



Foto: Istimewa

“Ternyata di triwulan satu kemarin, pertumbuhan ekonomi KBI lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi KTI. Artinya apa? Sudah baratnya lebih mendominasi, tumbuhnya lebih cepat pula. Artinya, potensi kesenjangan makin melebar,” papar Bambang.

10 Metropolitan dan Tahapan Ibukota Baru

Bambang mengakui pemindahan ibukota bukan satu-satunya solusi pemerataan ekonomi. Hal kedua yang akan dilakukan pemerintah adalah membangun 10 metropolitan baru. Empat di antaranya di Jawa dan sisanya enam metropolitan akan dikembangkan di luar Jawa yaitu di Medan, Palembang, Denpasar, Makassar, Banjarmasin, dan Belitung. Keenam kota besar akan dikembangkan jadi metropolitan bersamaan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya dalam lima tahun.

Keputusan ibukota baru akan ditentukan lokasinya tahun ini.

“Kemarin kami rapat di Bappenas kita mengkaji lebih dalam supaya dua bulan ini

datanya lebih lengkap, untuk bisa disajikan ke Presiden sehingga Presiden bisa memutuskan lokasinya,” lanjut Bambang.

Tahun depan pemerintah akan menyelesaikan desain besarnya sehingga *Ground Breaking* atau pembangunan awal akan dimulai pada 2021.

“Kita harapkan pada 2024 ibukota baru sudah fungsional, sudah siap jadi pusat pemerintahan baru,” kata Menteri Bambang.

Dalam tersebut, pemerintah berjanji akan menggerakkan tenaga-tenaga ahli perkotaan dari Indonesia untuk merancang *smart city* di ibukota baru. Terlebih saat ini SDM lokal untuk membangun *smart city* sudah tersedia.

“Setiap tahun ada 2000-an lulusan perencanaan kota. Jadi, dari sisi suplai profesional kita punya,” kata Perencana Perkotaan Bernadus Djonoputro dalam acara yang sama di Bappenas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari website Indonesia Development Forum dirilis pada 23 Mei 2019 dan dapat dibaca pada link <https://indonesiadevelopmentforum.com/2019/article/14273-pemindahan-ibu-kota-siap-libatkan-masyarakat-lokal-hingga-bangkitkan-sulawesi>

MENELAAH SEJARAH OTONOMI DAERAH

BAGIAN 2 - SELESAI

Oleh **Hendri F. Isnaeni**

Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya. Daerah-daerah pun harus terpacu untuk menciptakan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Pembaruan Pemerintahan

Dominasi orang Eropa dan pejabat pemerintahan dalam dewan lokal membuat Simon de Graaf, Direktur pemerintahan dalam negeri di Batavia, cemas. “Kini pembaruan dalam pemerintah semakin mendesak disebabkan kekhawatiran akan timbulnya oligarki, mengingat keikutsertaan penduduk dalam urusan pemerintahan terbatas pada segelintir orang pemimpin di tingkat politik tertinggi,” tulis Elsbeth Locher-Scholten dalam etika yang berkeping-keping.



De Graaff berpendapat bahwa desentralisasi tak mungkin direalisasikan dalam satuan daerah setingkat keresidenan. Desentralisasi haruslah dilaksanakan keresidenan yang berformat lebih diperbesar dengan kemandirian yang lebih diperbesar pula, yang dia sebut *de nieuwe gouvernement*. Sementara bagian dari *gewest* hendaknya dijadikan keresidenan yang lebih kecil, dengan asisten residen diangkat menjadi residen. *De nieuwe gouvernement* atau pemerintahan baru tersebut berupa provinsi dan kabupaten.

Undang-Undang Desentralisasi 1903 kemudian diamandemen dan melahirkan Undang-Undang Pembaruan Pemerintahan 1922 (*Bestuurshervormings wet 1922*). “Amandemen kali ini dimaksudkan untuk merintis jalan bagi golongan pribumi memperoleh tempat yang lebih besar dalam tata pemerintahan,” tulis Soetandyo.



Presiden Soekarno mengeluarkan UU No. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini merumuskan bahwa prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi riil dan seluas-luasnya. Sumber : Setneg

Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan Ordonansi Provinsi No. 78/1924, Ordonansi Kabupaten No. 79/1924, dan Ordonansi Kotapraja No. 365/1926.

Pada 1 Januari 1926, diresmikan Provinsi Jawa Barat yang melebur empat keresidenan: Banten, Batavia, Bandung, dan Cirebon. Pada 1 Januari 1929 diresmikan Provinsi Jawa Timur, dan setahun kemudian Provinsi Jawa Tengah. Di setiap provinsi akan dibentuk dewan provinsi. Di tiga provinsi tersebut kemudian dibentuk kabupaten (*regentschaps*) dengan dewan kabupaten. Di daerah-daerah otonom luar Jawa-Madura masih berlaku Undang-Undang Desentralisasi 1903, dan baru berubah tahun 1937 dan 1938.



Desentralisasi yang setengah abad diupayakan dengan susah payah akhirnya pupus ketika Pemerintah Kolonial Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 1942 lewat Perjanjian Kalijati.

Tujuan De Graaf ialah desentralisasi kepegawaian dan pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. “Dewan-dewan provinsi hanya akan memberikan saran,” tulis Elsbeth Locher-Scholten. “Hanya pada tingkat kabupaten, dewan-dewan kabupaten di bawah pimpinan residen akan mengatur urusan setempat.”

Menurut Soetandyo, dewan kabupaten terbentuk dengan jaminan mayoritas anggotanya berasal dari wakil-wakil golongan bumiputra, dengan ketua dijabat residen (bupati) setempat. Pada 1932, sebanyak 76 kabupaten di Jawa-Madura telah dilengkapi dengan dewan, berjumlah 1.583 anggota, 837 anggota di antaranya adalah bumiputra.

Desentralisasi yang diupayakan susah payah sepanjang setengah abad pupus ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942. Tatanan pemerintahan amat sentralistis, hierarkis, dan mengikuti garis komando dari pusat sampai daerah.

Menuju Otonomi Daerah

Setelah kemerdekaan, jalan menuju desentralisasi menghadapi jalan terjal. Konsep desentralisasi diterapkan melalui sejumlah Undang-Undang, yang sayangnya tak bisa diterapkan karena faktor politik. Di masa Orde Lama, misalnya, Undang-Undang No. 1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah



Presiden Soeharto menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Sayangnya tak ada desentralisasi dan otonomi daerah yang signifikan terjadi di zamannya. Pemerintah Orde Baru masih enggan melimpahkan kekuasaan kepada daerah. Foto: gahetna.nl

menerapkan konsep desentralisasi dengan “sistem residu”, yaitu wewenang pemerintah daerah adalah sisa dari wewenang yang tidak menjadi urusan pemerintah pusat.

“Sayangnya ide pembaruan itu tidak sempat diaplikasikan, karena pada waktu bersamaan Indonesia disibukkan oleh munculnya sejumlah gerakan di daerah,” ujar Syarif.

Undang-Undang itu tak sempat diberlakukan karena Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Untuk mengisi kekosongan, Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 6/1959 dan No. 5/1960, yang menyebabkan kepala daerah berkedudukan sebagai penguasa tunggal di daerah seperti halnya presiden yang menjadi penguasa tunggal di pusat.

“Hal tersebut mirip riwayat *pra-Decentralisatie Wet 1903* tatkala residen bertakhta sebagai penguasa tunggal di daerah masing-masing dan gubernur jenderal sebagai penguasa tunggal di pusat,” tulis Soetandyo.

Perubahan juga terjadi pada struktur pemerintahan daerah. Melalui Peraturan Presiden No. 22/1963, keresidenan dan kewedanan dihapus. Kekuasaan dan kewenangan residen dan wedana diserahkan kepada pemerintah daerah/kepala daerah tingkat I dan II.

Di akhir masa kekuasaannya, Soekarno memaklumkan Undang-Undang No. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Menurut Syarif, Undang-Undang ini cukup menarik karena rumusan tentang tujuan akhir desentralisasi mengindikasikan bahwa prinsip dasar otonomi daerah adalah ‘otonomi riil dan seluas-luasnya.’ Sayangnya, hanya beberapa minggu setelah disahkan, Soekarno dipaksa mengakhiri kekuasaannya.

Pemerintahan Orde Baru melalui Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 menegaskan bahwa Undang-Undang No. 18/1965 harus ditinjau kembali karena dianggap memberi kekuasaan dan otonomi terlampau besar kepada daerah. Sebagai gantinya, terbit Undang-Undang No. 5/1974, yang mengedepankan mantra khas Orde Baru: persatuan dan stabilitas politik demi ‘otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab’.



Sumber: <https://tangerangonline.id>

Hut Otonomi Daerah ke-XXIII diperingati di Banyuwangi, Jawa Timur, para kepala daerah menerima penghargaan berkat inovasinya membangun daerah masing-masing.

Praktis, selama Orde Baru, tak ada desentralisasi dan otonomi daerah yang signifikan. “Hal yang sesungguhnya terjadi, bila tidak mau dikatakan (re)sentralisasi yang berkeras hati, adalah proses desentralisasi semu atau bentuk 'otonomi elite pemerintah daerah' yang dikontrol elite pemerintah pusat,” tulis Soetandyo.

Baru pada 1995 terbit Peraturan Pemerintah No. 8/1995 di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan. Kebijakan ini dijadikan tonggak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga pada 7 Februari 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11/1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.

Tamatnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 menjanjikan harapan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Lahirlah Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membenahi hubungan pusat dan daerah. Daerah memiliki

kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Seiring dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada 2004, Undang-Undang No. 22/1999 diganti dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan penting dalam undang-undang itu adalah ditetapkannya pemilihan daerah (pilkada) secara langsung. Pilkada langsung berjalan beriringan dengan pemekaran daerah.

Undang-Undang No. 32/2004 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan selalu melakukan supervisi, monitoring, kontrol, dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. *(Selesai)*

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari majalah Historia dan dapat dibaca pada link http://bit.ly/Historia_MenelaahSejarahOtonomiDaerah



SAIK dan Perbaikan Tata kelola Kampung Bis Agats

Oleh **PETRUS SUPARDI**

“Tahun 2019 ini, kami sudah anggarkan biaya pemutakhiran data penduduk berbasis SAIK. Ketua RT dan RW akan membantu kader kampung untuk melakukan pengecekan dari rumah ke rumah supaya data warga menjadi lebih akurat. Melalui data SAIK yang akurat, perencanaan pembangunan di kampung Bis Agats akan menjadi lebih tepat sasaran”

Wilibrodus Samderubun
Kepala Kampung Bis Agats

Saat ini, kampung-kampung di seluruh Indonesia sedang giat membangun kampungnya. Warga kampung berjumpa dalam musyawarah kampung. Di dalam musyawarah tersebut, mereka memutuskan program pembangunan di kampung. Pada akhirnya, mereka sendiri terlibat mengerjakan berbagai program pembangunan di kampung.



Foto: Desy Mutialim/Yayasan BaKTI

Musyarawah kampung menjadi momentum warga kampung membicarakan masa depan kampung. Tetapi, apa dasar mereka berbicara tentang kampung? Pada titik ini, tidak dapat dimungkiri bahwa data kampung memiliki peran strategis dalam perencanaan masa depan kampung.

Di Papua, tepatnya di Kabupaten Asmat, bagaimana mendorong pemerintahan kampung memiliki data kampung? Bagaimana mendorong pemerintahan kampung bersama warganya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) yang partisipatif dan berbasis data?

Untuk mendukung ketersediaan data di kampung, LANDASAN II hadir di Asmat dan memperkenalkan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK). Melalui aplikasi SAIK, data kampung dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan perencanaan pembangunan kampung. Selain itu, di dalam aplikasi SAIK tersedia pula format data administrasi, terutama surat menyurat bagi warga kampung.

Salah satu kampung di Distrik Agats, yang pro-aktif menyediakan data penduduk dalam aplikasi SAIK yaitu kampung Bis Agats. Kampung ini terletak di tengah kota Agats, yang merupakan ibu kota kabupaten Asmat. Dalam menyiapkan pendataan berbasis SAIK, kepala kampung Bis Agats, Wilibrodus Samderubun mengangkat kader kampung. Kini, kader kampung aktif mengoperasikan SAIK.

Kader kampung Bis Agats, Erold Msen. Ia bekerja keras sejak Mei 2017 untuk melakukan pendataan penduduk kampung Bis Agats menggunakan format SAIK. Ia melakukan pendataan di Kampung Bis Agats yang terdiri atas 8 RT. Kini, sudah dimekarkan menjadi 16 RT.

Sejak pertengahan 2018, Erold tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh Ambana dan Berto. “Kami ambil data warga kampung menggunakan format SAIK. Kemudian, kami input ke dalam aplikasi SAIK di komputer” tutur Erold sambil memperlihatkan data SAIK di komputernya.

Kini, seluruh warga kampung Bis Agats sudah terdata di dalam aplikasi SAIK. Jumlah penduduk



**Kepala kampung Bis Agats, Wilibrodus Samderubun (atas)
Kader kampung Bis Agats, Eroid Msen sedang melayani
warga yang akan mengurus surat di kantor kampung Bis
Agats (kiri)**

Foto : Petrus Supardi

yang terinput di SAIK adalah 3.249 jiwa. “Saya lihat ada anggaran di APBK 2019 untuk pemutakhiran data SAIK. Jadi, kalau dana desa sudah cair, kami akan pergi ke setiap RT untuk melakukan pembaruan data penduduk,” tambah Eroid.

Kehadiran Eroid Msen, Ambana Karubaba dan Alberto Y.P. Kaiba mengubah wajah kantor kampung Bis Agats. Sebelumnya, kantor kampung Bis Agats sepi lantaran aparat pemerintahan kampung jarang masuk. Kini, suasana di kantor terlihat ramai, baik oleh aparat kampung maupun warga yang datang silih berganti untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan.

Eroid menjelaskan bahwa SAIK tidak hanya berguna untuk melihat data penduduk, tetapi juga mempermudah pembuatan surat keterangan bagi warga kampung. Setiap warga kampung yang membutuhkan surat pengantar dengan mudah diproses karena namanya sudah ada di dalam data SAIK.

“SAIK ini sangat membantu pemerintahan kampung dalam mengurus surat menyurat. Di dalam aplikasi SAIK sudah ada format surat. Misalnya, surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat keterangan miskin dan lain-lain. Kalau warga kampung datang minta

surat keterangan, kami masukkan NIK langsung print sesuai surat yang diperlukan” jelas Eroid.

Data SAIK pun telah dimanfaatkan oleh pemerintahan kampung Bis Agats untuk penyusunan RPJM kampung. Pada tahun 2017, kampung Bis Agats menyusun dokumen RPJM kampung menggunakan data SAIK. Data SAIK menjadi data dasar pada Bab 2 RPJM kampung yang memuat profil kampung. Selain itu, data SAIK dimanfaatkan untuk menganalisis kebutuhan pembangunan kampung ke depan.

“Saya sangat berterima kasih kepada Program LANDASAN II yang sudah datang membantu kami di Asmat. Secara khusus, kami pemerintahan kampung Bis Agats sangat berterima kasih karena melalui SAIK kami dapat mengetahui jumlah penduduk secara akurat,” tutur Kepala Kampung Bis Agats, Wilibrodus Samderubun.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga Kampung Bis Agats, pada APBK tahun 2019, Kampung Bis Agats telah menganggarkan pembelian motor Viar. “Kami beli motor Viar supaya setiap kegiatan kampung kami bisa umumkan kepada seluruh warga Kampung Bis Agats. Kami akan sampaikan kepada setiap warga untuk mengurus KK, KTP, akta lahir anak dengan menggunakan motor Viar ini. Termasuk sosialisasi HIV-AIDS dan bahaya miras pun kami akan gunakan motor Viar,” tegas kepala kampung yang tiba di Agats pada tahun 1969 ini.

Pihaknya juga akan membangun balai kampung Bis Agats. “Kami sudah anggar di APBK 2019 untuk pembangunan balai kampung.



Kami akan gunakan balai sebagai tempat pertemuan, pelatihan dan sosialisasi HIV-AIDS dan berbagai kegiatan lainnya,” tutur Wilibrodus.

Data SAIK berkontribusi nyata pada semangat perbaikan tata kelola Kampung Bis Agats. Demi efektivitas pemutakhiran data warga kampung Bis Agats, Wilibrodus telah menganggarkan dana di APBK 2019. Dana tersebut akan digunakan oleh ketua RT dan kader kampung Bis Agats untuk pergi ke setiap rumah dan melakukan pemutakhiran data penduduk.

“Kami anggarkan dana untuk RT dan kader kampung melakukan pendataan terhadap warga kampung Bis Agats yang belum terdata. Kader kampung tidak akan kerja sendiri. Mereka akan dibantu oleh RT dan RW. Jadi, pada tahap pertama di tahun 2019 ini, kader kampung dan RT sama-sama melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Ke depan, setiap bulan ketua RT melaporkan status warga RT kepada kader kampung untuk diinput ke dalam aplikasi SAIK,” tutur pria kelahiran Tual, tahun 1950 ini.

Saat ini, pemerintahan Kampung Bis Agats telah memberikan honor kepada RT dan RW. Melalui honor yang diterima diharapkan ketua RT dan RW bisa bekerja efektif, terutama memastikan penduduk di RT dan RW masing-masing. Sebab, ketua RT dan RW yang mengetahui setiap penduduk yang lahir, mati, pindah datang dan pindah pergi keluar.

“Mulai tahun 2019 ini, ketua RT dan RW mendapatkan honor sebesar Rp 500.000 setiap

bulan. Kita berharap ketua RT dan RW nanti bekerja efektif. Mereka harus membantu kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Bis Agats. Kalau RT dan RW yang tidak mau bekerja, kita akan ganti,” tegasnya.

Untuk mendukung pelayanan ketua RT, pemerintahan Kampung Bis Agats telah menyediakan meja kerja, kursi dan buku pendataan penduduk. Setiap RT akan mendapat meja, kursi dan buku pendataan penduduk. Setiap warga RT akan didata. Kemudian, setiap bulan data penduduk tersebut akan dilaporkan ke pemerintahan Kampung Bis Agats.

Wilibrodus Samderubun mengatakan bahwa pihaknya akan segera merilis *website* SAIK Kampung Bis Agats. “Kami akan kasih *online website* SAIK supaya potret kampung Bis Agats bisa dikenal secara luas. Setiap pembangunan di kampung Bis Agats akan ditampilkan di *website* SAIK kampung Bis Agats,” tuturnya.

Pria kelahiran Tual itu masih memendam impian terbesarnya. Ia berharap ke depan, Kampung Bis Agats menjadi tempat belajar bagi aparat pemerintahan kampung di Kabupaten Asmat. “Saya berharap, kami memperbaiki tata kelola, termasuk sarana dan prasarana supaya ke depan, kalau orang mau belajar tentang pengelolaan kampung, mereka bisa belajar di sini,” harapnya.

Ia mengatakan bahwa untuk mewujudkan impiannya itu, semua pihak harus membantu dirinya dan aparat pemerintahan Kampung Bis Agats. Sebab, perbaikan tata kelola tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apa lagi kondisi sosial budaya di Asmat sangat menantang sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak, terutama pemerintahan Distrik Agats, DPMPK dan semua *stakeholder* terkait lainnya.

“Saya sangat berharap pemerintahan Distrik Agats, DPMPK, KOMPAK-LANDASAN II, P3MD membantu kami. Tolong bimbing kami, terutama dalam upaya perbaikan tata kelola kampung supaya ke depan, kami dapat melayani warga Kampung Bis Agats dengan lebih baik lagi,” paparnya penuh harap.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK - LANDASAN II dapat menghubungi info@bakti.or.id



PERKAWINAN ANAK DAN PENCAPAIAN SDGs

BAGIAN 2 - SELESAI

Oleh **LUSIA PALULUNGAN**

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan tegas mengatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.



Mencegah kematian bayi baru lahir dan Balita merupakan target kedua SDGs yang ingin dicapai di tahun 2030, Seluruh negara berkomitmen menurunkan angka kematian neonatal hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian Balita menjadi 25 per 1000 kelahiran hidup.
Foto : Ichsana Djunaed/Yayasan BaKTI

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah ada jauh sebelumnya, dimana dalam Undang-Undang Perkawinan batas usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Bahkan Undang-Undang Perkawinan memberi peluang untuk adanya mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak yang akan menikah dibawah usia 16 tahun. Dalam realitasnya, Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada umumnya dengan dasar menghindarizinah.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya aturan yang lebih jelas tentang batasan pemberian dispensasi bagi hakim pengadilan agama dalam memproses dan memutus permohonan dispensasi. Sehingga hakim pengadilan agama sebagai otoritas pemberi dispensasi tidak memiliki panduan dalam batas usia dispensasi, terkait persyaratan permohonan, pertimbangan dalam memberikan dispensasi dan pembuktian permohonan dispensasi.

Upaya untuk mencegah perkawinan anak terus dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, diantaranya oleh Koalisi 18+ (delapan belas plus), yang mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, dimana Putusan MA Nomor 22/PUU-XV/2017 mengabulkan permohonan tersebut sebagian yaitu menyatakan pasal 7 ayat (1) usia 16 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu Putusan MA ini juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk daam jangka waktu paling lama tiga tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Salah satunya adalah hak atas pendidikan, karena banyak anak yang telah menikah akan mengalami putus sekolah, dan hal ini dapat menyebabkan semakin sempitnya peluang bagi perempuan muda untuk memperbaiki kesejahteraannya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, usia layak menikah adalah di atas 18 tahun. Bahkan dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 26 ayat 1 bagian c, menegaskan salah satu tanggung jawab orang tua adalah: mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal tersebut didasarkan dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, mental dan kesiapan ekonomi.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak didukung oleh keberadaan Undang-Undang



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Diskursus tentang perkawinan anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir dimana setelah tujuan pembangunan milenium berakhir pada tahun 2014. Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghapus perkawinan anak. Upaya untuk menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut.

Di dalam Metadata TPB/SDGs pada Tujuan 3 yaitu Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk pada Semua Usia, target pertamanya adalah pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Ada 3 indikator dari target ini yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, dan

Perkawinan anak memberikan dampak buruk bagi pembangunan manusia karena skala permasalahan yang ditimbulkannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan upaya untuk menghapus perkawinan anak dalam SDGs.

Foto : Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Sedangkan target kedua adalah pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Ada 4 indikator dari target ini yaitu Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;



dan persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Target dan indikator tersebut merupakan salah satu upaya global dan nasional untuk mencegah perkawinan anak. Sehingga Rencana Aksi Daerah untuk Pencapaian SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia juga berkontribusi pada pencapaian tersebut melalui kegiatan dan program kerja pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Dalam perkembangannya untuk merespon permasalahan perkawinan anak, beberapa Kantor Urusan Agama juga telah mulai menolak untuk mengawinkan calon pengantin yang berumur dibawah 18 tahun. Begitu pula pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa dan lurah, telah memberikan peringatan pada orang tua bahwa perkawinan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum. Namun upaya ini masih bersifat temporer dan kasuistik.

Komitmen untuk menghentikan perkawinan anak menjadi tanggung jawab bersama untuk

Perbaiki layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan masyarakat yang ada termasuk tersedianya tenaga medis yang terlatih diupayakan untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Foto : Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

mencegah perkawinan usia anak. Peran serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok sangat diperlukan. Pemaparan dan argumentasi urgensi pencegahan perkawinan anak yang telah diuraikan, maka penting dan perlu adanya upaya-upaya dari berbagai pihak yang berkompeten terkait dengan kewenangan perkawinan anak, baik pemerintah, non pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan bahkan anak itu sendiri. Hal ini untuk mencegah dampak yang lebih besar dan luas terhadap pihak yang mengalami perkawinan pada usia anak, khususnya perempuan.
(Selesai)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email lpalulungan@bakti.or.id



Jembatan Keledai dari Paniai

Oleh **LUNA VIDYA MATULESSY**

Anda tahu “*mejikuhibiniu*”? Ya. Itu adalah “jembatan keledai” – cara mudah untuk mengingat jenis-jenis warna pelangi: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu.

S

eperti “*mejikuhibiniu*” untuk mengingat komposisi warna pelangi, ada sebuah jembatan keledai yang digunakan untuk mengingat prinsip-prinsip BANGGA Papua. Jembatan keledai

BANGGA Papua terdiri dari lima prinsip. Ke lima jari kita dapat mewakilinya: ibu jari untuk hal pertama, telunjuk untuk hal ke dua dan seterusnya. Ke lima hal itu adalah, satu: anak Orang Asli Papua, dua: empat tahun ke bawah, tiga: Rp. 200 ribu per bulan per anak, empat: untuk kebutuhan anak (peningkatan gizi dan kualitas kesehatan anak) dan lima: transfer dana ke ke rekening mama di bank.

Dengan memakai jembatan keledai ini, tujuan BANGGA Papua dapat dinarasikan secara lebih mudah, dalam kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Misalnya dengan kombinasi prinsip 1-4, kita bisa memahami salah satu tujuan BANGGA Papua yakni memperbaiki kualitas kesehatan anak asli Papua yang berusia empat tahun ke bawah, dari



ancaman gagal tumbuh otak dan fisik (*stunting*) karena kurang gizi yang berkepanjangan. Di dalam tujuan itu, ada titaan ke latar belakang dan posisi tawar BANGGA Papua di masyarakat. Posisi tawar BANGGA Papua adalah bahwa program ini bukan hanya untuk mengatasi isu kurang gizi, ada ancaman lain yang membayangi gagal tumbuh otak dan fisik, yaitu ancaman kematian. Kematian anak balita karena kurang gizi adalah salah satu penyebab kematian utama di tanah Papua.

Jembatan keledai dalam bentuk lima prinsip ini belakangan mulai diperkenalkan dan diurusutamakan dalam pelatihan-pelatihan untuk melengkapi pelaksana sosialisasi BANGGA Papua, yang telah berlangsung beberapa kali. Dengan prinsip-prinsip ini, peserta diperkenalkan pada level komunikasi yang lebih baik dari sekedar 'sosialisasi'. Komunikasi yang dibangun harus mencapai tahap dimana penerima pesan betul-betul memahami isi pesan. Jadi keterampilan peserta berkembang dari 'sosialisasi' menjadi 'pahamisasi'.

Membangun Barisan Pewarta

Setiap pelatihan melahirkan pembelajaran baru. Semakin lama, semakin memperkaya pembelajaran bersama dalam BANGGA Papua. Dari pelaksanaan pelatihan, datang pembelajaran tentang fakta keterpencilan kampung-kampung, misalnya. Penerima manfaat BANGGA Papua adalah individu yang tinggal di kampung-kampung. Siapa yang mampu menjangkau mereka di wilayah terpencil? Siapa yang mampu menumbuhkan pemahaman mereka tentang pentingnya program? Siapa yang didengar dan dipercaya oleh masyarakat di kampung-kampung, sehingga bisa memengaruhi masyarakat agar mau meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarganya?

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa lebih dari sekedar keterpencilan, untuk bergerak dari 'sosialisasi' ke 'pahamisasi,' dibutuhkan pembawa pesan yang tepat. Dibutuhkan pewarta atau penyuluh, yang mampu mengemas dan menjembatani informasi baru yang diperoleh dalam pelatihan, dengan fakta keseharian masyarakat ke mana para pembawa pesan ini akan pergi.

Mengingat keterbatasan sumber daya manusia di setiap Sekber BANGGA Papua untuk mengisi kebutuhan tersebut dibandingkan dengan jumlah kampung yang ada, menjadi penting untuk membangun lini pendukung untuk peran pewarta. Selain kemampuan cakupan, hal yang perlu digaribawahi terkait 'siapa' yang dapat diharapkan menjadi pewarta BANGGA adalah soal kualitas kehadiran mereka di kampung. Sebab 'pahamisasi' tidak bisa dilakukan dengan sekali kunjungan, seperti umumnya kegiatan sosialisasi. Dibutuhkan figur yang sesuai untuk menjawab pembelajaran dalam fakta keterpencilan lokasi tinggal anak-anak yang berhak menjadi calon penerima manfaat Program BANGGA Papua.

Pada pertengahan Mei 2019 yang lalu, berlangsung pelatihan yang menysasar kader Posyandu senior, bidan Puskesmas/kampung dan tim penggerak PKK di Kabupaten Paniai. Pelatihan dengan peserta 'khusus' di luar anggota sekber ini, dilaksanakan berdasarkan hasil diskusi mendalam dengan tim komunikasi Sekber Kabupaten Paniai.



Dalam proses temu kenal peran pembawa pesan dalam diskusi tersebut, untuk Paniai, para pembawa pesan yang dinilai tepat adalah para kader Posyandu senior dan bidan Puskesmas/kampung. Disebut 'kader senior', karena mereka sudah lama tinggal dan bekerja di 10 distrik lama/distrik tua di Paniai, jauh sebelum distrik-distrik itu dimekarkan sebagai distrik baru, atau pun menjadi wilayah kabupaten baru yang berbatasan dengan Paniai, seperti Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai.

Selain para kader dan bidan kampung, pelatihan komunikasi ini, juga merangkul Tim Penggerak PKK yang memiliki aset sumber daya hingga ke tingkat dasawisma, yaitu kelompok yang terdiri dari 10-20 Kepala Keluarga (KK) dalam satu RT.

Para kader dan bidan kampung ini tinggal bersama atau dekat dengan masyarakat yang dilayaninya. Mereka memahami dengan baik tantangan-tantangan kesehatan ibu dan anak yang ada di masyarakat. Mereka dipercaya masyarakat.

Jembatan Keledai dari Paniai

Pelatihan Komunikasi Persuasif BANGGA Papua memang didesain untuk memberi porsi yang seimbang bagi peserta untuk mempraktikkan teori-teori yang diperoleh. Tapi untuk meningkatkan level efektifitas komunikasi dari 'sosialisasi' menjadi 'pahamisasi', pewarta sendiri harus percaya pada pesan yang akan diteruskan.

Sang pewarta harus menemukan jembatan gagasan antar dua sisi yang berseberangan.

Untuk melakukannya, mereka harus mengasah pengetahuan dan pengenalan mereka tentang dalam-dangkal bagian-bagian sungai, sehingga mereka dapat menyeberangkan pemahaman pada titik yang tepat.

Jembatan keledai BANGGA Papua dengan bantuan satu tangan dan jari-jemari, akan menolong siapa saja mengingat lima prinsip BANGGA Papua dan menarasikan tujuan-tujuan BANGGA Papua. Begitu pula sesi praktik pelatihan untuk para kader senior, bidan Puskesmas/kampung dan anggota TP-PKK Kabupaten Paniai, telah melahirkan jembatan-jembatan pemahaman yang sangat menginspirasi.

200.000 Rupiah Bukanlah Fokus Program

Hari terakhir pelatihan, seperti sebelumnya, ditutup dengan sesi 'tongkat kesan'. Dalam sesi ini setiap orang diberi kesempatan menyampaikan kesan terhadap pembelajaran yang mereka peroleh dalam satu setengah hari pelatihan.

"Saya percaya, uang 200 ribu ini bisa menjadi berkat. Seperti 5 roti dan 2 ikan, yang setelah diberikan kepada 5000 orang makan kenyang, masih sisa 12 keranjang penuh," Mama Beatrice – kader Posyandu.

Kisah 5 roti 2 ikan, dengan pengumpulan 12 keranjang sesudah semua orang makan hingga kenyang, yang disebut itu, merupakan kutipan cerita dalam kitab suci Kristiani, di mana Yesus membuat mukjizat, memberi makan 5000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, tetapi setelah



Foto-foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

semua orang makan kenyang, dan sisa rotinya dikumpulkan, terkumpul 12 keranjang penuh.

“Saya pikir BANGGA Papua itu hanya bagi-bagi uang. Tetapi ternyata ada pengetahuan tentang bagaimana kita berikan anak-anak gizi yang baik dan bagaimana dengan memberikan gizi yang baik, kita selamatkan generasi Papua. Dua ratus ribu itu hanya penopang saja” – Vivian Gobai, Sekretaris TP-PKK.

Sungguh Jejak Cara Pikir yang Sangat Positif

Program intervensi bantuan langsung tunai cenderung akan dihadang komentar miring terkait jumlah dana, serta efektifitas dana di tangan penerima manfaat. BANGGA Papua tidak terkecuali. Dalam simulasi pada pelatihan mau pun pada uji coba sosialisasi oleh peserta pada pelatihan sebelumnya, komentar tentang dana Rp 200 ribu ini bersifat pesimis. Misalnya, “200 ribu itu sedikit, sebentar saja su habis. *Tra* cukup.”

Tetapi para kader Posyandu dan bidan kampung ini mampu melihat bahwa uang Rp 200 ribu, bukanlah fokus program BANGGA Papua. Fokus utamanya adalah perubahan cara pikir masyarakat agar mau memprioritaskan peningkatan gizi dan kesehatan anak.

Tidak berhenti di situ saja, tapi ada visi masa depan yang bersifat generasional dalam pemikiran yang tumbuh sepanjang proses ToT.

“Saya pikir, BANGGA Papua ini hanya bagi-bagi uang saja. Ternyata ada pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu tentang pentingnya gizi untuk anak, bahaya *stunting*

yang mengancam Papua dan kesejahteraan OAP.” Seorang peserta lain mengatakan, “BANGGA Papua ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak kami.” Mereka melihat program BANGGA Papua dari sudut pandang yang optimis.

Belajar dari Paniai

Cerita dari pembelajaran ‘jembatan keledai ala Paniai’ adalah cerita tentang kemampuan membangun jembatan pemahaman yang bersifat lokal. Kemampuan membangun jembatan penyeberangan gagasan seperti dalam frasa ‘2 ikan, 5 roti, sisa 12 bakul’ bersanding dengan frasa ‘200 ribu itu sedikit, sebentar saja su habis. *Tra* cukup,’ niscaya akan terbaca dan dipahami sebagai tanda telah terjadi perubahan cara pandang yang mendasar dalam merespon dukungan.

Kemampuan membangun jembatan gagasan adalah menemukan cara membuat yang kita kenal dengan nama ubi jalar dikenali sebagai ‘*ipere*’ di wilayah kaum Dani, atau ‘*nokta*’ di Paniai, kawasan kaum Mee dan Moni. Ubi jalar, *ipere* atau *nokta* adalah benda yang sama, dengan nama lokal. Demikian yang bisa kita harapkan, ketika orang yang tepat, menyampaikan pesan dengan meniti jembatan yang pas. Bahkan yang asing dan rumit, menjadi dekat. Lekat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua dapat menghubungi info@bakti.or.id

Membekali Guru PAUD di Pulau Saparua

Oleh **TIRZA WENDRY KAILOLA**

K

ebijakan pemerintah yang menetapkan satu desa satu PAUD, mendorong antusiasme para praktisi pendidikan dan masyarakat untuk menginisiasi pembukaan kelompok bermain dan taman kanak-kanak di setiap desa. Dengan berjamurnya keberadaan PAUD di setiap desa, maka penting untuk dipastikan bahwa setiap anak mengalami sistem pembelajaran yang memaksimalkan pertumbuhan

dan perkembangan mereka secara positif. Salah satu faktor yang turut mendukung terciptanya sebuah satuan pendidikan yang berkualitas adalah kualitas dari tenaga pendidik. Pendidik yang berkompeten akan menciptakan sebuah kegiatan pembelajaran yang efektif bagi anak dan mendukung tumbuh-kembang anak dengan baik. Namun pada realitanya, sebagian besar tenaga pendidik PAUD adalah lulusan sekolah menengah atas dan tidak memiliki latar belakang pendidikan PAUD, sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran belum sesuai dengan tahapan perkembangan anak.

Kondisi yang sama juga terjadi di Provinsi Maluku. Kualitas pendidikan anak usia dini di Maluku saat ini masih perlu mendapat perhatian khusus. Realita inilah yang mendorong Heka Leka menginisiasi gerakan peningkatan mutu tenaga pendidik di Maluku. Inisiatif ini telah dimulai 4 tahun lalu melalui mobilisasi tenaga relawan datang ke Maluku untuk kegiatan pembelajaran kreatif dengan para guru. Namun gerakan ini belum direncanakan secara strategis, terstruktur, teratur dan terukur. Melalui pembelajaran selama 6 bulan di Selandia Baru memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar menciptakan sebuah gerakan cerdas yang berdampak bagi komunitas kami. Hasil dari pembelajaran ini didesain untuk diaplikasikan dalam bentuk sebuah proyek pengembangan masyarakat. Pelatihan dasar Guru PAUD menjadi program yang strategis untuk dikembangkan untuk menjawab tantangan dalam pendidikan anak usia dini di Provinsi Maluku. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau, turut memengaruhi kualitas pendidikan di semua pulau-pulau di Maluku. Kebanyakan dari guru-guru PAUD hanya berijasah SMA dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.



Program ini didesain untuk melengkapi guru-guru di taman bermain dan taman kanak-kanak, agar memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai dalam menerapkan kurikulum pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan aspek-aspek perkembangan anak. Program ini telah disusun dan dilengkapi dengan modul pelatihan yang sebelumnya telah direview oleh beberapa ahli pendidikan anak usia dini dari Selandia Baru, Margareth Fritzzgibbon dan Judy Tyler serta Lestia Primayanti, Direktur Sekolah Kembang. Sebanyak 21 guru dari 10 PAUD di Pulau Saparua dan 1 PAUD dari Pulau Nusa Laut mengikuti program pelatihan dasar pendidikan anak usia dini ini. Pelatihan berlangsung selama 6 hari dalam 3 bulan yaitu dari 21 Maret – 18 Mei 2019. workshop ini ada 3 kali dalam tiga bulan. Setelah satu workshop selesai, tiap peserta diberi waktu 3 minggu untuk menerapkan materi yang diberikan. Begitu seterusnya selama 3 bulan dengan topik berbeda yang dipelajari para guru.

Di bulan pertama workshop, topik yang diperkenalkan adalah memahami tumbuh kembang anak. Anak usia dini memiliki karakteristik berbeda dengan usia sesudahnya, baik dalam fisik biologis, motorik, kognitif, moral, dan psiko-sosialnya. Oleh karena itu

perlakuan dan pendidikan untuk anak usia dini juga spesifik, di mana harus mempertimbangkan kesesuaian dengan usia kronologis serta pertumbuhan dan perkembangannya. Bagi orang tua, pendidik maupun pihak yang terkait di bidang pendidikan pra sekolah, menjadi sebuah keharusan untuk memahami tumbuh kembang anak usia dini yang bertujuan untuk membantu menumbuh kembangkan anak-anak secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Topik ini dibedah dalam 2 hari pertemuan dan para peserta belajar melalui metode refleksi pribadi, *inquiry learning* dan diskusi. Peserta diberikan pula kesempatan untuk refleksi sebelum dan setelah sesi bagaimana mereka mengajar selama ini dan apakah cara pengajarannya telah sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Usai refleksi, peserta kemudian berdiskusi dalam kelompok apa saja hal yang harus diubah dari cara mengajar masing-masing. Rencana perubahan dari hasil diskusi kelompok yang akan dikembangkan di sekolah masing-masing kemudian diterapkan dalam waktu 3 minggu berikutnya. Hasil penerapannya didiskusikan lagi dalam pertemuan selanjutnya di bulan kedua.



Anastasia Krofani dari TK Air Hidup Desa Tiouw, Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah mengungkapkan perasaan syukurnya setelah ikut pelatihan ini. Awalnya beliau berpikir bahwa di sekolah anak harus diisi dengan ilmu saja. Pandangannya berubah ketika hadir dalam ruang pelatihan. Ternyata hak anak harus diperhatikan dan anak harus belajar dalam suasana yang nyaman tanpa tekanan.

“Pelatihan ini mendorong saya untuk terus berinovasi dan berkreatifitas mengembangkan diri lebih baik sehingga orang tua bisa lebih memercayai kami untuk mendidik anak mereka” kata Anastasia

Di bulan kedua para peserta mengeksplorasi metode pembelajaran bermain sambil belajar. Metode ini sangat penting untuk diajarkan kepada guru, mengingat sistem pembelajaran PAUD yang diterapkan di Maluku masih menggunakan metode yang sama dengan sekolah dasar yaitu anak dikondisikan untuk duduk dengan baik dan mendengar penjelasan guru di kelas. Untuk memperkenalkan para guru tentang teknik pembelajaran yang berbasis pada permainan, sesi ini disusun dengan menggunakan metode eksperimental. Para guru dibagi dalam beberapa kelompok dan

mereka akan berkeliling dan mencoba 5 jenis permainan yang telah kami siapkan di setiap pos belajar.

Beberapa di antaranya adalah memancing huruf, membentuk *play dough*, membuat menara dari kertas bekas dan berkreasi dengan alam. Metode ini dipakai untuk memberikan kesempatan bagi para guru untuk mengalami sensasi bermain yang bermakna sehingga pengalaman ini yang akan mendorong mereka untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan kepada anak di kelas. Setelah sesi materi tentang metode belajar sambil bermain, para peserta diminta untuk menciptakan kelas pintar 3D dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan imajinasi dan harapan para guru untuk sebuah perubahan yang akan mereka lakukan di kelas mereka.

Susana Pasanea dari KB Tunas Leilisa Desa Itawaka, Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah mengatakan sangat puas dengan pelatihan ini karena begitu banyak perubahan luar biasa yang harus dia lakukan terkait dengan cara mengajar, dan menerapkan belajar sambil bermain.



21 guru dari 10 PAUD di Pulau Saparua dan 1 PAUD dari Pulau Nusa Laut mengikuti program pelatihan ini.

Foto-foto: **Dok. Heka Leka**

dan perilaku guru yang menerapkan tujuh prinsip yakni menghormati anak, mendorong perilaku sosial yang positif, disiplin diri dan karakter anak, memaksimalkan partisipasi anak, mendukung tumbuh kembang anak dan kebutuhan akan kehidupan yang layak, menghormati motivasi dan tujuan hidup anak, menegakkan keadilan dan mempromosikan solidaritas.

Metode Pengajaran Disiplin Positif bertujuan untuk mengakhiri kekerasan di sekolah. Mitos bahwa hukuman kekerasan memberi dampak positif bagi anak-anak, perlu diakhiri. Hukuman fisik tidak menciptakan anak yang kuat dan pandai, namun mengingkari hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang bebas dari kekerasan. Melalui sesi pembelajaran inipun para guru bersepakat untuk menandatangani deklarasi sekolah ramah anak, yang antara lain berisi; komitmen setiap guru untuk membantu tumbuh-kembang anak dengan menciptakan suasana belajar yang positif dan aman buat anak, berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang positif dan santun kepada anak, tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk fisik, psikis dan verbal kepada anak, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, memperlakukan anak dengan baik dan sopan tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, status sosial, kemampuan dan fisik, mendengar anak dan menanggapi setiap pendapat anak dengan serius dan menjadi duta perlindungan anak di masyarakat dengan mengadvokasi orangtua dan masyarakat demi terpenuhinya hak-hak anak.

Lewat tiga bulan pembelajaran ini dapat memberikan pengetahuan baru dan meningkatkan kualitas para guru dalam mengajar terutama dalam menciptakan ruang kelas yang ramah terhadap anak, kreatif dan menarik. Terima kasih untuk dukungan UnionAID, BaKTI dan semua pihak sehingga terlaksana kegiatan ini dengan baik. Salam Maluku Cerdas!

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah staf Heka Leka Maluku & Alumni Program INSPIRASI 2018 dan dapat dihubungi melalui email tirsa.kailola72@gmail.com

“Ketika saya menerapkan metode ini respon dari anak-anak luar biasa. Bahkan mereka tidak mau berhenti dari permainan yang kami sediakan. Saya bersyukur diberikan pelatihan gratis untuk menambah pengetahuan tentang cara mengajar anak yang lebih baik” ungkap Susana Pasanea dari KB Tunas Leilisa Desa Itawaka, Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah.

Manajemen perilaku menjadi topik yang dipelajari pada bulan ke tiga workshop. Topik ini sangat penting untuk dibicarakan karena Maluku adalah salah satu provinsi yang masih menerapkan hukuman fisik pada anak di sekolah walaupun menurut peraturan pemerintah, praktik hukuman fisik tidak lagi diizinkan di sekolah. Dalam sesi refleksi pribadi, peserta diminta untuk merefleksikan pengalaman yang tidak menyenangkan di sekolah dulu. Sebagian besar berkaitan dengan hukuman fisik yang diberikan oleh guru maupun orangtua. Pengalaman ini menjadi kunci untuk masuk dalam materi mengenal hak-hak anak dan peran guru dalam mendorong terpenuhinya hak-hak anak di sekolah. Setelah sesi ini, para guru juga mendapat kesempatan untuk mempelajari penerapan metode disiplin positif di sekolah. Sesi ini bertujuan untuk membentuk pola pikir

LANDASAN II Dorong Pengarutamaan Adminduk dan GESI

Oleh **FADHILAH MANSYUR**

P

emahaman mengenai program adalah modal awal yang diperlukan bagi setiap anggota tim untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing. Inilah yang menjadi

dasar dilaksanakan-nya Rapat

Koordinasi (Rakor) untuk Induksi Tim Program KOMPAK-LANDASAN II yang berlangsung selama 6 hari di Hotel SwissBell Jayapura, Papua, tanggal 17-22 Juni 2019.

Rakor untuk Induksi ini diikuti oleh seluruh anggota Tim LANDASAN termasuk koordinator provinsi Papua dan Papua Barat, koordinator kabupaten dan distrik serta seluruh spesialis yang membawahi beberapa bidang intervensi LANDASAN II. Materi-materi yang dibawakan selama induksi diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan membantu anggota tim agar lebih memahami tujuan dari program. Dengan demikian, setiap anggota tim memiliki persepsi yang sama tentang capaian yang akan diperoleh oleh program.

Program LANDASAN II dikelola oleh KOMPAK dan diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Program ini berjalan di 9 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu Kabupaten Asmat, Jayapura, Boven Digoel, Nabire, Lanny Jaya, Manokwari Selatan, Sorong, Fakfak dan Kaimana.

Selama enam hari, peserta diberi pemahaman mengenai gambaran umum program termasuk capaian program pada fase sebelumnya. Program ini dimulai sejak tahun 2017 dan terbagi dalam tiga tahapan. Tahapan pertama dimulai pada awal tahun 2017 dan berakhir di tahun 2018. Pada awal tahun 2019, program ini memasuki tahap transisi hingga bulan Mei 2019. Pada bulan Juli 2019 tahap



ketiga dimulai dengan perekrutan beberapa anggota tim baru yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program ini.

Disamping pemahaman umum mengenai Program LANDASAN II, peserta juga diberikan pengetahuan baru mengenai sistem PASH yang bermanfaat untuk menguatkan sistem pencatatan Adminduk dan bagaimana mengimplementasikan gender dan inklusi sosial dalam program LANDASAN II.

PASH

Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati yang disingkat PASH atau yang secara internasional dikenal dengan *Civil Registration & Vital Statistic (CRVS)* merupakan hal yang perlu segera dilakukan di Papua dan Papua Barat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lengkap dan akurat berdasarkan bukti.

Menurut data dari Susenas, saat ini posisi Adminduk Papua dan Papua Barat menempati posisi terbawah secara nasional, sehingga acuan



Foto: Abdul Rahman Ramlan/Mayasan BaKTI

data kependudukan untuk perencanaan layanan dasar belum bisa dilakukan secara akurat.

Hingga tahun 2017, hanya 45% anak di Papua dan 71,3% anak di Papua Barat yang memiliki akta kelahiran. Angka ini cukup jauh dari ambang batas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 85%. Artinya, sekitar 655 ribu anak di Papua dan 95 ribu anak di Papua Barat tidak memiliki identitas hukum dan menghilang dari peta statistik. Jumlah kepemilikan NIK relatif lebih baik dibandingkan akta kelahiran. Berdasarkan angka di Susenas, kurang lebih 68% penduduk Papua dan hampir 90% warga Papua Barat telah memiliki NIK.

Kepemilikan dokumen ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara seperti kesempatan melanjutkan pendidikan, meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan, membuka akses pada sumber-sumber peghidupan ekonomi dan kepastian perlindungan hukum.

Bagi Program LANDASAN II yang bertujuan untuk peningkatan layanan dasar, PASH adalah pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola layanan di Papua dan Papua Barat. PASH berisi data-data mengenai kelahiran, perkawinan, kematian dan penyebab kematian, perpindahan penduduk, perceraian, dan perubahan status. Sistem ini dibuat secara inklusif dan akuntabel sehingga dapat melayani semua lapisan masyarakat dan mudah diakses. Oleh karena itu, setiap anggota tim LANDASAN II perlu memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya data kependudukan.

Materi PASH dibawakan oleh PUSKAPA, salah satu mitra Program KOMPAK yang telah banyak bekerja dalam penguatan sistem Adminduk di beberapa daerah intervensi Program KOMPAK termasuk Papua dan Papua Barat. Diwakili oleh M. Jaedi dan Rama Adiputra, PUSKAPA memberikan banyak informasi mengenai PASH termasuk model-model yang digunakan untuk pengumpulan data PASH serta kondisi Adminduk di Papua dan Papua Barat.



Dalam pemaparannya, Pak Jaedy menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang membentuk PASH ini saling mendukung satu sama lain. Ketiadaan satu dokumen dapat menghambat pembuatan dokumen lainnya. Dokumen tersebut juga tidak akan berakhir di selembar kertas saja, namun akan menjadi dasar perencanaan layanan dasar yang menghasilkan statistik hayati yang akurat dan lengkap sehingga menjadi bagian penting dalam mengurangi kemiskinan di Papua dan Papua Barat

Di akhir materi, setiap peserta diminta untuk membuat model perencanaan PASH di masing-masing kabupaten. Mereka juga diminta untuk memaparkan strategi apa yang dapat dilakukan di daerahnya untuk melakukan pengumpulan dokumen-dokumen kependudukan beserta peluang dan tantangan yang akan mereka hadapi saat pendokumentasian.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut terlihat bahwa tantangan paling besar yang dialami oleh hampir semua kabupaten adalah kurangnya pemahaman pemerintah akan pentingnya dokumen kependudukan. Kondisi geografis beberapa kabupaten juga menjadi penghambat. Misalnya beberapa kampung di Kabupaten Lanny Jaya yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan kampung-kampung di Kaimana yang sebagian besar harus dijangkau dengan perahu. Tantangan geografis ini menyulitkan pendokumentasian data-data kependudukan tersebut.

Sedangkan peluang terbesar yang dimiliki oleh Program LANDASAN II saat ini adalah adanya SAIK (Sistem Administrasi dan Informasi Kampung) yang telah berjalan di beberapa kampung dan SAID (Sistem Administrasi dan Informasi Distrik) yang telah dibangun di salah satu distrik di Kabupaten Manokwari Selatan, Momiwaren.

Terlepas dari seluruh peluang dan tantangan tersebut, seluruh Koordinator Kabupaten sependapat bahwa *stakeholder* yang akan paling banyak membantu mereka dalam pendokumentasian ini adalah Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Selain itu, kerjasama dengan sekolah untuk mengumpulkan anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran sehingga bisa dibuatkan secara kolektif serta kerjasama dengan Puskesmas untuk mendata setiap bayi yang lahir. Sehingga pendekatan terhadap *stakeholder* seperti Dukcapil, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Kepala Kampung akan adalah hal pertama yang akan dilakukan.

Gender dan Inklusi Sosial

Gender dan Inklusi Sosial atau yang sering disebut dengan GESI juga merupakan hal penting dalam peningkatan layanan dasar. Hal ini sesuai dengan tujuan Program LANDASAN II untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas sehingga dapat mengatasi ketidaksetaraan.



Beberapa kampung di Kabupaten Lanny Jaya yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tantangan geografis ini menjadi penghambat dalam pendokumentasian penduduk (kiri) Foto: Dok. KOMPAK

GESI dapat menghapus hambatan yang dialami oleh perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marjinal dalam berkontribusi, berpartisipasi & mendapatkan manfaat langsung dari program (kanan) Foto: Abdul Rahman Ramlan/Yayasan BaKTI

Materi terkait GESI yang diampu oleh Ratna Fitriani, Gender dan Inclusion Manager Program KOMPAK, telah membuka wawasan para peserta mengenai pentingnya kesetaraan gender dan inklusifitas dalam mendukung fokus program LANDASAN II terutama terkait dengan hambatan dan kondisi yang dihadapi oleh perempuan miskin, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok lain yang termarginalkan.

Pada prinsipnya, GESI bertujuan untuk menghargai keanekaragaman yang dipertimbangkan dalam desain implementasi dan pemantauan setiap kegiatan dalam Program LANDASAN. Hal ini diharapkan dapat menghapus hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya dalam berkontribusi dan berpartisipasi serta mendapatkan manfaat langsung dari program.

Lalu bagaimana implementasi GESI dalam Program LANDASAN II?. Dalam pemaparannya,

Ratna mengusulkan untuk menggunakan *twin approach* dengan metode intervensi khusus dan pengarusutamaan. Dalam intervensi khusus, akan diterapkan kuota 50% bagi kader terpilih adalah perempuan dan pembuatan sekolah bagi kader kampung untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan.

Pada intervensi pengarusutamaan, hal yang perlu dilakukan oleh Program LANDASAN II adalah memastikan kepentingan perempuan, anak dan masyarakat rentan menjadi bagian dari proses perencanaan peningkatan layanan kampung dan unit-unit layanan yang dapat diukur melalui rencana kampung, rencana Puskesmas, rencana sekolah dan komite sekolah. Selain itu, mendorong keterlibatan perempuan dalam proses-proses pembuatan perubahan melalui keterlibatan perwakilan perempuan dalam tim kabupaten, tim distrik, tim perencanaan kampung dan kader kampung.

Selanjutnya, seluruh figur-figur perempuan yang terlibat dan berkontribusi akan didokumentasikan melalui artikel-artikel tentang LANDASAN pada media-media publikasi cetak maupun *online* sebagai *role model* bagi perempuan kampung.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN II dapat menghubungi info@bakti.or.id



Foto: Joudy M. (www.flickr.com/photos/61373150@N00)

Kolintang

Dari Musik Ritual Hingga Panggung Festival

Bagian 2 - Selesai

Kolintang, alat musik khas Minahasa telah ada sejak zaman leluhur, tetap menjadi bagian dalam budaya masyarakat Minahasa hingga kini

Oleh **RIKSON KARUNDENG**

Kolintang, alat musik khas dari Minahasa, Sulawesi Utara. Akrab di tanah kelahirannya dan terkenal di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Zaman terus berubah dengan tantangannya masing-masing namun musik kolintang terbukti masih tetap eksis.

Tak bisa dipungkiri, musik yang telah berevolusi dalam jalan waktu ini sering mengalami pasang surut di tengah pergulatan zaman. Adrie Fredie Elean, salah seorang pencinta musik kolintang, punya kisah sendiri soal itu. Kepada saya, ia menuturkan tentang berbagai kisah terkait eksistensi musik kolintang dalam tantangan zaman.

Kenangan dan Mimpi Seorang Pencinta Musik Kolintang

Adrie Elean adalah *tou* (orang/manusia) Minahasa yang telah mengenal dan ikut bermain kolintang sejak kanak-kanak. Bahkan sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia telah memiliki kemampuan untuk membuat seperangkat alat musik kolintang. Di usia remaja ini, dia sangat dikenal karena kemampuannya bermain melodi

yang luar biasa. Bagi para seniornya, ia merupakan pemain melodi yang memiliki karakter tersendiri. Tidak mengherankan jika sejak usia remaja ia telah malang-melintang dalam berbagai *event* musik kolintang.

“Deri tahun tujuh puluh kita kua so bermain di banya grup kolintang bahkan jadi pelatih di berbagai grup, baik di Tondano maupun di tampa-tampa laeng di Minahasa. Cuma sebelum taong tuju tiga kua masih orkes kolintang. Nanti taong selanjutnya tu kolintang melulu so top di iven-iven. Kita pe grup pertama Esa Rendem di Kuramber Tondano. Torang sering juara. Waktu itu satu Minahasa kenal pa torang. Dari taong tuju ampa sampe akhir taong tuju puluh, nda ada yang ja dapa se kalah pa torang. Samua piala bergilir, bae tingat Minahasa sampe Sulut, mati pa torang,” kenang Elean yang sejak dulu ternyata selalu dipercayakan grupnya untuk memegang melodi.

Ia menuturkan, tahun 1976 pernah ada *event* tingkat nasional yang diselenggarakan Taman Budaya di Tikala Manado. Grup-grup kolintang se-Indonesia yang berjumlah 40-an, ikut ambil bagian. Grup Mawenang dari Jakarta ternyata menjadi juara saat itu, sementara ia dan grupnya hanya menempati posisi kedua. Selesai *event* tersebut, ia dan ketiga temannya diajak untuk masuk dapur rekaman di Jakarta.

“Kita, Fani Lesar, Roy Surentu deng Roby Waney, dorang ajak ka Jakarta mar cuma kita tu nda pigi. Soalnya waktu itu kita masih ta ika kontrak deng banya instansi sama deng BRI, Pengadilan, Kejaksaan, LP (Lembaga Pemasyarakatan), deng banya grup laeng. Tu Rudy, abis deri Jakarta dorang langsung pangge ka Surabaya. So dia tu jadi pelatih grup-grup di sana kemudian. Roy Surentu masih eksis jadi pelatih di sekolah-sekolah skarang. Kalu tu Fani Lesar, kita baru baku dapa waktu Institut Seni Budaya Sulawesi Utara deng Pa' Benny Mamoto beking *Guinness World Records* taong dua ribu spuluh. Dia waktu itu jadi ketua tim juri di lomba. Taong tujuh lima kita lei Om Evert Langkay tu tokoh KRIS pernah pangge mo rekaman di Jakarta mar karna masih baya kontrak, nda ta pigi lei,” kenangnya.

Elean mengatakan, ada beberapa hal yang sangat berkesan dalam memorinya saat bermain

musik kolintang. Di antaranya ketika ia diundang untuk jadi pemain melodi saat artis terkenal Rima Melati menyanyi di Hotel Ricardo Winangun. Selain itu, ia pernah ditunjuk menjadi pelatih sekaligus pemain melodi anak-anak Panti Asuhan Nazareth pada tahun 1976. Saat itu mereka tampil di hadapan Presiden Marcos dari Filipina yang berkunjung ke Manado. Marcos ternyata sangat terpukau saat ia dan salah seorang anak panti asuhan memainkan berbagai instrumen dengan melodi kolintang sambil menutup mata.

Gempuran budaya pop ternyata cukup menggeser musik kolintang. Menurut Elean, tahun 1980-an, anak-anak muda lebih gemar ke disko dan *event-event* musik kolintang berkurang. Belakangan kolintang bahkan sudah tergantikan organ tunggal (digital).

“Dulu, tiap acara ato pesta ada kolintang. Anak-anak suka ba kumpul di tampa latihan. Jadi, kalu nda main kolintang berarti nda gaul. Mar deri taong lapang puluh samua berubah drastis. Taong tujuh puluhan, kalu ja lomba ja sampe lapang puluh grup. Taong lapang puluhan, pembinaan so kurang, kong tu perhatian banya pihak lei so menurun,” ujar pria yang banyak melatih generasi muda hingga di kemudian hari menjadi pelatih sejumlah grup kolintang.

Adrie Elean barangkali bukan seorang yang terkenal atau pun populer di dunia kolintang namun bukan berarti dia tak memiliki jasa sedikit pun di dunia kolintang. Di balik pribadi yang pemalu dan kehidupannya yang sederhana itu, ternyata tersimpan sebuah mimpi yang besar bagi musik kolintang.

“Kolintang itu identitas tou Minahasa, jadi dia musti trus ada. Tu urgen saat ini barangkali tu soal pembinaan. Iven itu penting mar pembinaan berkelanjutan tantu harus diutamakan. Di tiap-tiap wanua (desa) musti ada tampa pembinaan, bukang cuma di sekolah-sekolah. Itu samua boleh mo jalan kalu pemerhati seni deng budaya, pamarentah deng samua tou Minahasa di mana saja, boleh saling baku tongka mo perhatikan ini Kolintang”. (*Selesai*)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan bersumber dari kelung.com dan dapat dibaca pada link <https://kelung.com/kolintang-dari-musik-ritual-hingga-panggung-festival/>

Selama 15 tahun, majalah **BaKTI**News**** telah dicetak dan distribusikan ke pelosok Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia.

Kini Anda dapat mengakses **BaKTI**News**** dari gawai Anda. Dapatkan informasi terkini tentang inisiatif dan praktik cerdas pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Berbagai fitur menarik disajikan untuk memudahkan pembaca memilih artikel dari topik yang diminati. Anda juga dapat berkontribusi mengirimkan artikel ke redaksi majalah **BaKTI**News****. Segera kunjungi:

www.baktinews.bakti.or.id





Kegiatan di BaKTI

15 Juli 2019

Konsolidasi Dukungan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI memfasilitasi pertemuan untuk Dukungan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Pertemuan dihadiri oleh berbagai lembaga dan organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Koalisi Sahkan RUU-PKS antara lain Serikat PEKKA, KPI Sulsel, Aisiyyah, AJI Makassar, YASMIB Sulsel, AIPJ-2.



Pertemuan ini strategis mengingat sejak bulan Juli 2019, RUU PKS mulai dibahas kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Namun di sisi lain, terdapat kelompok-kelompok yang menolak RUU-PKS. Pertemuan ini mendiskusikan materi-materi yang dapat digunakan untuk kampanye dukungan RUU-PKS. Harapannya, semua mitra koalisi dapat membagikan platform media sosial yang telah dihasilkan oleh berbagai mitra nasional.

18 Juli 2019

Diskusi Penyusunan Panduan Pengembangan PKSAI dan Materi KIE Tahap I

Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Unicef mendukung pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah replikasi di Kabupaten Bulukumba, Maros dan Kota Parepare. Pengembangan PKSAI di wilayah replikasi/baru, tentu membutuhkan panduan dan materi sebagai referensi untuk dimuat melalui media situs Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga kabupaten/Kota dapat mengakses informasi secara daring. Unicef melalui Yayasan BaKTI



menyelenggarakan pertemuan penyusunan panduan pengembangan PKSAI tahap I di Kantor BaKTI. Hasil pertemuan antara lain, peserta memberikan masukan terkait isi panduan yang akan dikembangkan, penjelasan tentang peluang untuk posting materi dan panduan melalui website Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

24 Juli 2019

Closing Ceremony Program Indonesia Teaching Fellowship (ITF) Ruangguru

Ruangguru bersama Persada Capital Inverstama dan Adaro Foundation menggagas program Indonesia Teaching Fellowship (ITF). Program ini merupakan pelatihan guru daring berbasis aplikasi untuk melatih bidang pedagogik guru. Tujuan dari dilaksanakannya program ITF ini adalah untuk menyiapkan guru-guru dalam mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan era industri 4.0. Setelah satu tahun berjalannya program ITF, Ruangguru melaksanakan acara Closing Ceremony di Kantor BaKTI Makassar. Acara ini dihadiri oleh Kepala Bidang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK), Dinas



Pendidikan Kota Makassar Bapak Bahrum, S.Pd., M.Pd. Dalam acara ini, juga dilantik 10 guru sebagai Pengurus Nasional Komunitas ITF di wilayah Makassar dan juga pioneer terbentuknya Komunitas ITF. Ke depannya, Komunitas ITF juga diharapkan dapat menjadi tempat berdiskusi dan bertukar pikiran bagi guru-guru dan dapat melahirkan ide-ide segar serta kontribusi nyata demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.



Politik Relawan di Indonesia

PENULIS Arga Pribadi Imawan

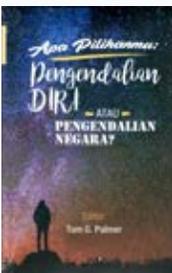
Kehadiran komunitas relawan banyak dilihat sebagai bentuk kesadaran politik dari kelas menengah di Indonesia, terutama sebagai ekspresi gerakan sosial-politik yang banyak muncul sejak memasuki era tahun 2010 ke atas hingga saat ini. Kehadiran komunitas-komunitas relawan secara tidak langsung menjadi perubah wajah perpolitikan, terutama menjadi warna baru bagi kajian ilmu politik di Indonesia.



Demokrasi Dalam Genggaman Para Pemburu Rente

PENULIS Desi Rahmawati

Kajian-kajian tentang persoalan demokrasi di Indonesia pascareformasi banyak memfokuskan diri pada isu-isu, seperti bosisme, disintegrasi, politik identitas, kekerasan komunal, kekuatan tradisional, dan berkembangnya institusi demokrasi liberal. Sementara itu, beberapa peneliti masih memandang perlu untuk melihat sejauh mana kekuatan-kekuatan politik yang berakar pada Orde Baru masih berpengaruh. Buku ini menyajikan wawasan baru bagi para pembaca yang tengah mempelajari kecenderungan demokrasi di Indonesia, mereka yang tengah memikirkan jalan keluar dari beragam persoalan demokrasi, serta yang memiliki perhatian terhadap meluasnya praktik korupsi dan perburuan rente di negeri ini.



Apa Pilihanmu: Pengendalian Diri atau Pengendalian Negara?

EDITOR Tom G. Palmer

Pengendalian diri atau kendali oleh negara? Menggabungkan bersama studi kasus dan pemikiran ilmiah, sejarah, dan filsafat dan menjadikannya sebuah buku saku bagi orang-orang merdeka yang menginginkan kehidupan masyarakat yang bebas, damai, saling bekerja sama, sejahtera dan adil. Buku ini bersifat teoritis dan praktis. Isinya dapat membantu pembaca mencapai hidup yang lebih bahagia, menjadi orang yang lebih baik dan menikmati keuntungan dari kebebasan dan tanggung jawab.



Negara Etnik (Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak)

PENULIS JJ Kusni

Negara Etnik dari JJ Kusni ini hadir merespon persoalan otonomi daerah dan persoalan kedaerahan pada umumnya dari perspektif tersendiri. Buku ini bernuansa politis secara kental, melengkapi euforia reformasi yang hingga kini masih menggema. "Orang Dayak hidup dalam suatu masyarakat yang 'raja boleh membakar rumah, penduduk tak boleh menyalakan api'. Hampalit yang dulu hutannya tak tertembus matahari, sekarang berubah menjadi padang pasir sejauh mata memandang. Kita teringat akan ramalan beberapa penulis Barat, bahwa suatu ketika orang Dayak akan punah..."